

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. (2014). *Ekonomi Pembangunan*. UPP STIM YKPN.
- Barat, P. P. (2017). *Profil Daerah Kota Bogor*. Diambil kembali dari <https://jabarprov.go.id/index.php/pages/id/1058>
- Bogor, D. K. (2022). *BAPENDA Kota Bogor*. Diambil kembali dari <https://mpp.kotabogor.go.id/instansinew/detail/7>
- Bogor, W. K. (2011, 04 06). Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame. Bogor, Jawa Barat, Indonesia: Sekretaris Daerah Kota Bogor.
- Bogor, W. K. (2016, 11 01). Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor. Bogor, Jawa Barat, Indonesia: Sekretaris Daerah Kota Bogor.
- Bogor, W. K. (2019, 12 12). Peraturan Walikota Bogor Nomor 115 Tahun 2019 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Bogor, Jawa Barat, Indonesia: Sekretaris Daerah Kota Bogor.
- Bogor, W. K. (2021). Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor . Bogor, Jawa Barat, Indonesia.
- Carunia, M. F. (2017). *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli daerah dalam Pembangunan Daerah*. yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (t.thn.). Diambil kembali dari Postur

APBD kota Bogor:

<https://djk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?tahun=2021&provinsi=10&pemda=19>

Inayah, A. N. (2019). *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di Kota Bogor*.

Indah Ayu Sulviane, H. d. (2014). Strategi Penerimaan Pendapatan Pajak Reklame di Kabupaten Bogor.

Indonesia, M. H. (2009, 09 15). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta, Indonesia.

Indonesia, R. (001, 09 13). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia: Sekretaris Negara Republik Indonesia.

Indonesia, R. (2004, 10 15). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia: Sekretaris Negara Republik Indonesia.

Indonesia, R. (2014, 10 02). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 24 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Jakarta, G. P. (2011, 12 29). Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia: Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (2017). Diambil kembali dari Kota Bogor
ProfilDaerah: <https://jabarprov.go.id/index.php/pages/id/1058>

Pohan, R. (2007). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Banda Aceh:

Lanarka.Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat.

Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Sunyoto, D. (2013). *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: Refika Aditama.